

**KERJASAMA BILATERAL AMERIKA SERIKAT DENGAN BOLIVIA DALAM
PEMBERANTASAN KOKAIN PADA MASA PEMERINTAHAN PRESIDEN EVO
MORALES (TAHUN 2006 - 2010)**

Samsul Ma'arif

Idjang Tjarsono

Email : sam.maarif17@gmail.com

Cp : 087790460996

Abstract

This paper describes the bilateral cooperation the United States with Bolivia in combating cocaine during the reign of president evo morales years 2006 to 2010. Bolivia is the third largest producer of cocaine in Latin America. The level of cocaine trafficking and production of high causing threats to major countries like the United States. The threat was made united States issued a policy war on drugs against Bolivia. Coca plant has been part of the traditional culture of Bolivian society to meet the needs of daily life. Culture led to increased trade and circulation of cocaine production have threatened major countries like the United States. Addressing these threats, the United States issued a policy war on drugs to Bolivia in cooperation with the government of Bolivia. The cooperation policy turns negative effect on security of Bolivia with much of the killing, torture and human rights violations against the population and coca farmer in Bolivia.

Key Word : cooperation, intervention, security, violations of human rights

Pendahuluan

Tulisan ini akan memaparkan tentang kerjasama bilateral Amerika Serikat dengan Bolivia dalam pemberantasan kokain pada masa pemerintahan presiden Evo Morales tahun 2006 – 2010. Bolivia merupakan negara terbesar ketiga penghasil kokain di Amerika Latin. Peredaran dan produksi kokain yang terjadi di Bolivia telah menimbulkan berbagai permasalahan yang dapat mengancam negara lain. Sebagai negara dunia ketiga, Bolivia kerap kesulitan untuk memberantas kartel kartel narkoba khususnya kartel kokain, dikarenakan kurangnya dana dan juga masih lemahnya kekuatan militer. Peredaran kokain tersebut memaksa Bolivia untuk melakukan kerjasama dengan negara besar seperti Amerika Serikat yang juga merasa terancam dengan peredaran kokain yang bersumber di Bolivia.

Kokain merupakan salah satu jenis obat-obatan terlarang atau narkotika yang bahan bakunya berasal dari tanaman koka. Koka (*erythroxylon coca*) adalah sebuah tanaman dalam famili *erythroxylaceae*, yang merupakan tumbuhan asli dan juga tumbuh subur di kawasan barat laut amerika latin seperti di negara Bolivia, Peru dan Kolombia. Daun koka sendiri mengandung alkaloid kokain, sebagai dasar bagi obat kokain yang merupakan stimulan kuat. Secara tradisional tanaman koka memegang peran penting dalam budaya Andes, khususnya pada masyarakat asli Bolivia yang menggunakan koka sebagai bahan tambahan masakan atau di kunyah untuk menahan rasa sakit dan lapar juga untuk kebutuhan sehari-hari lainnya. Daun Koka sendiri

merupakan bahan baku dari kokain, namun secara tradisional koka tidak bisa dilepaskan dari kehidupan tradisional masyarakat Bolivia, karena di pergunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan juga kebutuhan obat-obatan. Keadaan tersebut tentu menjadi sebuah masalah, dimana di satu sisi koka menjadi bagian yang tidak dapat di pisahkan dari kehidupan tradisional masyarakat Bolivia, tapi disisi lain pertumbuhan tanaman koka menjadi sebuah ancaman bagi negara-negara yang selama ini dianggap sebagai negara yang memiliki tingkat pemakaian narkoba yang cukup besar, seperti Amerika Serikat. Faktor kemiskinan dan kesenjangan sosial menjadi alasan utama bagi kebanyakan masyarakat Bolivia untuk menjadi petani koka.

Hingga saat ini, Bolivia tercatat sebagai negara penghasil kokain terbesar ketiga di dunia setelah Peru dan Kolombia. Antara tahun 1978 sampai dengan 1985 penanaman daun koka meningkat dari 12.000 hektar sampai dengan 80.000 hektar. Penghasilan yang di dapat para petani koka dengan peningkatan dan keuntungan bersih mencapai us\$ 6.000 sampai dengan us\$ 9.000 setiap hektar pertahunnya.¹ Peningkatan produksi koka terus berlanjut memasuki pertengahan tahun 1980 sampai dengan tahun 1997. Pada tahun tersebut produksi daun koka mencapai us\$ 500 juta pertahun atau 5 sampai 8 persen dari GDP Bolivia, melebihi produksi pertanian lainnya.² Daerah peredaran terbesar dari kokain tersebut adalah wilayah Amerika bagian utara. Kondisi tersebut tentu membuat Amerika Serikat merasa terancam, karena Amerika Serikat sendiri mengklaim bahwa tingkat pemakaian narkoba dan obat bius di negaranya adalah yang terbesar. Selain itu, hal tersebut juga menjadi ancaman bagi posisi Amerika Serikat menyangkut perdagangan bebas, terlebih lagi dengan meningkatnya GDP Bolivia Pertahunnya dan program NEP yang dicanangkan pemerintah Bolivia tahun 1985 membawa Bolivia untuk mengembangkan potensi pasar dalam persaingan di tingkat global. Hal tersebut di anggap dapat memberi pengaruh buruk terhadap program privatisasi dan neoliberalisasi yang di canangkan oleh Amerika Serikat. Untuk itu Amerika Serikat berupaya untuk mengeluarkan kebijakan perang terhadap narkoba, khususnya kokain dan membrantas langsung pada sumbernya. Peredaran kokain di Bolivia bagi Amerika Serikat merupakan hambatan bagi pembentukan program pasar bebas, hal ini di perkuat dengan fakta bahwa Amerika Serikat berusaha mencanangkan program alternatif untuk menyingkirkan hasil produksi koka yang di anggap telah memberikan dampak buruk dalam penghasilan kokain. Artinya program pemberantasan ladang koka menjadi salah satu kebijakan Amerika Serikat untuk mempercepat proses implementasi kebijakan pasar bebas (neoliberalisme) di Bolivia sebagai upaya dominasi Amerika Serikat terhadap Bolivia.³

Pada tahun 1998 Amerika Serikat juga mengeluarkan kebijakan *war of drug* terhadap tiga negara penghasil kokain terbesar yaitu Bolivia, Peru dan Kolombia.⁴ Kebijakan yang di keluarkan Amerika Serikat di tujukan untuk menghilangkan peredaran kokain yang berasal dari

¹ Jumlah keuntungan ini mencapai sepuluh kali keuntungan yang di dapat bila dibandingkan dari hasil keuntungan produksi dari buah jeruk. Kevin Healy, "Bolivian cocaine : a developing country dilemma" . <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1360-0443.1988.tb00445.x/pdf> di akses pada tanggal 24 maret 2012, pukul 21.00 WIB .hal yang sangat menarik adalah ketika coca ditanam setiap lima meter dari tanaman coca ditanami atau di selingi dengan buah jeruk.

² Benjamin Kohl Dan Linda Farthing, *Impasse In Bolivia : Neoliberal Hegemoni And Popular Resistance*, (London : Zed Books,2006),Hlm 51

³ kampanye anti-terorisme yang di lakukan George bush menjadi salah satu cara untuk mengatasi krisis kapitalisme global, mencari pasar baru dan sumber sumber ekonomi baru. lihat Nurani soyomukti, *Revolusi sandinista : perjuangan tanpa akhir melawan neoliberalisme* (yogyakarta : GARASI, 2008) Hlm 152

⁴ *The Drug War Across Borders : US Drug Policy and Latin America*, diakses dari http://www.drugpolicy.org/docUploads/fact_sheet_borders.pdf pada tanggal 28 maret 2012, pukul 22.30 WIB

daun koka, selain itu produksi kokain di Bolivia di anggap oleh Amerika Serikat telah menimbulkan permasalahan , seperti kejahatan dan kekerasan, sampai pada masalah kerusakan lingkungan sekitar. Menanggapi kebijakan yang di keluarkan pemerintah Amerika Serikat, maka untuk menagatasi Pertumbuhan produksi kokain yang semakin meningkat membuat presiden Bolivia yang berkuasa saat itu Hugo Banzer (1997-2001) mengeluarkan kebijakan *coca zero*, yaitu kebijakan pengembangan alternatif bagi tanaman penganti koka dan pembasmian koka yang sepenuhnya mendapat dana dan juga bantuan alat dan militer dari Amerika Serikat. Akar permasalahan pun terjadi ketika rezim Hugo Banzer berkuasa, yang di anggap terlalu pro terhadap kebijakan Amerika Serikat dengan kebijakan populernya yaitu Neoliberal dan privatisasi Demokrasi Liberal. Hugo Banzer telah memberikan janji dengan menjamin kepada pemerintah Amerika Serikat sebagai aktor utama dalam pembasmian ladang koka. Banzer juga menggunakan kekuatan militernya dalam upaya menghancurkan hasil pertanian koka, khususnya di daerah Yungas bagian timur La paz. Program yang di kenal dengan *coca zero* ini telah membuat para petani koka yang sangat di rugikan sebagai kebikan sepihak pemerintahan. Pembasmian telah menghilangkan mata pencaharian tradisonal mereka selama beribu ribu tahun. Bahkan pembasmian yang di bantu oleh pemerintah Amerika Serikat tersebut telah menghasilkan berbagai kejahatan kemanusiaan.

Pembahasan

Bolivia di bawah kepemimpinan Evo Morales dan permasalahan peredaran kokain di Bolivia

Republik Bolivia adalah sebuah negara di Amerika Selatan yang berbatasan dengan Brasil di sebelah utara dan timur, Paraguay dan Argentina di selatan, serta Chili dan Peru di barat.⁵ Diantara negara-negara di Amerika Selatan, wilayah Bolivia merupakan yang tertinggi dan terpencil. Negara ini adalah salah satu penghasil koka dan timah terbesar di dunia. Bolivia tidak memiliki akses ke daerah pantai, tetapi Bolivia merupakan salah satu penghasil minyak bumi dan gas alam terbesar setelah Venezuela di Amerika Latin. Penduduk mayoritas Bolivia adalah suku indian Aymara dan Quecha dan juga keturunan campuran antara indian dan kulit putih (Spanyol).

Penduduk asli Bolivia yang dinamakan orang Indian Aimara telah lama mendiami kerajaan inka sebelum Spanyol menaklukkan Bolivia pada tahun 1538. Spanyol kemudian menggabungkannya ke dalam kerajaan Peru. Tahun 1824, Simon Bolivar mengalahkan mereka yang bersimpati pada Spanyol di Yunnin de Ayacucho, dan pada tanggal 6 agustus 1825 di La Paz di proklamasikan Republik Bolivia. La Paz merupakan ibukota negara Bolivia yang terletak 3600 meter di atas permukaan air laut dan merupakan merupakan ibu kota negara tertinggi di dunia. Pada tahun 1825, ketika Bolivia berhasil membebaskan dari penjajahan spanyol, nama lengkap La Paz berganti menjadi La Paz de Ayacucho (kedamaian ayacucho)⁶. Suku asli di Bolivia yaitu suku Aymara dan Quchua, memiliki kebudayaan yang menyangkut dengan tanaman koka. Tanaman koka dapat tumbuh subur di daerah Yungas dan Chapere. Bagian dari tanaman koka yaitu dau koka di manfaatkan oleh suku asli di sana untuk upacara keagamaan, dan dalam kehidupan sehari hari. Mengunyah daun koka dapat menahan rasa lapar, karena

⁵ “Bolivia Country Profile”, Diakses Dari [Http://Www.Boliviainfoforum.Org.Uk/](http://Www.Boliviainfoforum.Org.Uk/) Pada Tanggal 1november 2012

⁶ dalam jurnal : Rum Muhammad, “ Bolivia : Tradisi Revolusi dan Indigenismo Evo Morales”, Selasa 25 Desember 2007

mayoritas suku indian adalah petani koka dan koka dapat menahan rasa dingin khususnya bagi masyarakat yang tinggal di daerah daratan tinggi.

Juan Evo Morales Ayma yang populer dikenal dengan nama Evo Morales lahir di Orinoca, Oruro, Bolivia, pada tanggal 26 Oktober 1959 adalah Presiden Bolivia dan menjadi orang pribumi pertama untuk jabatan kepala negara sejak penjajahan Spanyol lebih dari 470 tahun yang lalu.⁷ Klaim ini menyebabkan kontroversi, karena ada para presiden mestizo sebelumnya.⁸ Morales adalah seorang sosialis dan berasal dari suku Indian (Aymara) dan dilantik menjadi presiden pada tanggal 22 Januari 2006. Morales adalah pemimpin sayap kiri gerakan *cocalero* di Bolivia yaitu sebuah federasi kumpulan penanam daun koka yang melawan upaya-upaya pemerintah Amerika Serikat untuk membasmi koka di Provinsi Chapare di Bolivia tenggara. Morales juga adalah pemimpin partai politik Gerakan untuk Sosialisme (*Movimiento al Socialismo*) dengan singkatannya *MAS* yang terlibat dalam Perang Gas, bersama dengan kelompok lain yang biasanya di sebut sebagai "gerakan sosial".⁹

Pendekatan Morales terhadap permasalahan koka menunjukkan bahwa masalah koka harus di pecahkan pada sisi konsumsi, bukan dengan membami penanaman koka dan dengan mengirim lebih banyak militer ke kawasan penanaman koka. Janji untuk menekan kembali kebijakan Amerika Serikat terhadap kampanye pembasmian koka yang didanai Amerika Serikat. Daun koka di Bolivia dan daerah kawasan Andes, secara legal di gunakan sebagai bahan campuran untuk membuat teh dan untuk ritual penduduk asli, di luar kawasan tersebut, koka diklasifikasikan sebagai barang yang dilarang. Padahal, dibutuhkan proses kimiawi yang kompleks untuk mengubah koka menjadi kokain. Dalam kunjungannya ke wilayah pertanian koka di Irupana, Yungas, Sekitar 140 km dari La Paz, Morales meresmikan pabrik tempat pengolahan daun koka yang di biayai oleh venezuela untuk menghasilkan produk legal seperti teh dan minuman ringan. "mengolah (produk) koka tidak membahayakan karena koka bukanlah narkoba"¹⁰. koka di kembangkan di perbukitan Yungas selama berabad abad, dan telah menjadi bagian dari tradisi sehari hari masyarakatnya. koka dijadikan obat antitumor dan sebagai campuran dalam minuman teh. pemerintah Bolivia optimis bahwa produk koka yang legal ini akan memiliki pasar di Venezuela, Kuba, China dan India yang para pejabatnya menyatakan tertarik. Presiden Venezuela Hugo Chavez akan menyediakan 1 juta dollas AS untuk membiayai dua pabrik pengolahan koka. Berdasarkan hukum Bolivia, area seluas 12.000 hektar di Yungas diizinkan untuk digunakan sebagai lahan pertanian koka.

Kerjasama Amerika Serikat dengan Bolivia dalam pemberantasan kokain

Kebijakan perang terhadap obat-obatan terlarang sebenarnya sudah lama dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat. Amerika Serikat secara tradisional menanggapi penyalahgunaan narkotik dan perdagangan obat-obatan terlarang dengan sebuah pendekatan hukum dan unilateral, baik di dalam negeri maupun internasional. Sejak awal 1900-an, pemerintah Amerika Serikat telah mengadopsi sebuah paradigma hukum terhadap semua pengguna obat dan para

⁷ "Evo Morales Sworn in as Bolivia's First Indigenous President ", (Democracy Now), 23 Januari 2006.

⁸ Mesa, José, Gisbert, Teresa, Mesa Gisbert, Carlos D. *Historia de Bolivia: Segunda Edición corregida y actualizada*. Editorial Gisbert. La Paz, 1998.

⁹ George Junus Aditjondro. Ernesto "che" Guevara, Ernesto Laclau dan Kebangkitan Gerakan kiri di Amerika Latin. 2008. Jakarta : makalah yang di sampaikan dalam diskusi ulang tahun ke-18 Ernesto "che" Guevarra. hlm : 3

¹⁰ evo morales terapkan kebijakan anti kemiskinan, legalkan koka (bolivia, 20 juli 2006. di akses dari <http://www.kompas.com> tanggal 26 nov 2012.

pedagang obat-obatan terlarang. Khususnya, pada tahun 1914, pemerintah AS mengabulkan UU Harisson yang membentuk hukum dasar untuk pecandu.¹¹

Kerjasama Amerika Serikat dengan Bolivia dalam pemberantasan obat-obatan terlarang khususnya kokain sudah lama terjalin, tetapi kerjasama tersebut mulai di perketat pada sekitar tahun 1990-an. Hal tersebut dikarenakan adanya legalisasi produksi koka di Bolivia, sehingga menjadikan pertumbuhan koka semakin meningkat tiap tahunnya. Sampai pada saatnya, pemerintah Amerika Serikat memaksa untuk menandatangani perjanjian ekstradisi bilateral pada tahun 1995. Perjanjian tersebut dilakukan karna Amerika Serikat merasa warga negara Bolivia telah melakukan pelanggaran keras dengan terus memproduksi daun koka yang notabene adalah bahan dasar kokain, Meskipun beberapa bulan dilakukan perlawanan melalui tinjauan hukum, namun pada akhirnya Mahkamah Agung Bolivia tetap menyetujui perjanjian tersebut. Adanya perjanjian tersebut, maka secara tidak langsung pemerintah Bolivia menyerahkan masalah pembasmian kokain terhadap pemerintah Amerika Serikat.

Puncaknya ketika Hugo Banzer terpilih kembali menjadi presiden Bolivia pada tahun 1997 yang berhasil meratifikasi Undang-undang War on Drugs 1008 dimana pemerintahan Banzer akan memfasilitasi kebijakan Amerika Serikat untuk memerangi arus narkotika. Di bawah pemerintahan Hugo Banzer dengan Dekrit Presiden No. 26415, Bolivia dihadapkan kepada kepentingan Amerika Serikat, yaitu melarang ekspor koka ke luar negeri, terutama ke Amerika Serikat, melarang penjualan koka di pasar sebagai sebuah produk legal, pemusnahan ladang koka seluas 50 ribu hingga 60 ribu hektar dengan bantuan keuangan dari Amerika Serikat, pihak keamanan Bolivia melakukan cara-cara kekerasan. Akibatnya, sebagian besar penduduk Bolivia yang berprofesi sebagai petani koka kehilangan penghasilan. Pembasmian ladang koka ini diberlakukan oleh Hugo Banzer tanpa memberikan penggantian berupa pengalihan pertanian, akibatnya jumlah pengangguran semakin bertambah. Kebijakan tersebut mendapat berbagai kecaman dari berbagai pihak seperti para petani koka, tetapi pemerintah Bolivia pada saat itu tetap bersikeras untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Morales menegaskan pemerintahannya terus berupaya untuk memerangi tanaman koka ilegal serta menghentikan produksi dan penyelundupan kokain meski dengan segala keterbatasan, tetapi Morales tetap mempertahankan penggunaan tradisional koka yang sudah menjadi bagian penting budaya warga pegunungan Andes sejak berabad-abad silam. Morales sendiri adalah mantan petani koka dan kini masih menjabat sebagai ketua federasi petani koka Bolivia. November tahun lalu, Amerika Serikat dan Bolivia sepakat untuk memperbaiki hubungan diplomatik dan melanjutkan kerja sama memerangi narkotika. Pembicaraan untuk memperbaiki hubungan kedua negara mulai berlangsung kembali sejak tahun lalu. Sejak saat itu juga hubungan kedua negara kembali membaik meski ketegangan masih tetap mewarnai.

Hubungan bilateral Amerika Serikat dengan Bolivia mulai memasuki fase yang lebih berat ketika masalah perdagangan obat-obatan terlarang mulai meningkat. Diawali pada tahun 1980-an ketika masalah obat-obatan terlarang ini mulai mendapat perhatian yang lebih dalam hubungan bilateral mereka. Masalah obat-obatan ini memaksa Amerika Serikat untuk mulai menerapkan kebijakan yang berhubungan dengan pengawasan obat-obatan terlarang.

¹¹ E. C. Bertram, *Drug War Politics: The Price of Denial*, (Berkeley: Universitas of California press, 1996), hlm.102.

“The U.S. war on drugs has taken on life its own, an internal drive the will continue regardless of success in actually reducing the amount of illegal drugs that enter the United States”¹²

Kebijakan Amerika Serikat menegnai Kontrol atas obat-obatan terlarang terus berkembang. Kebijakan tersebut merupakan upaya untuk mencegah masuknya obat-obatan telarang ke wilayah Amerika Serikat dan ditujukan pada negara-negara sumber obat-obatan tersebut, termasuk Bolivia.

Bolivia sendiri merupakan negara dengan penghasil kokain tersebar ketiga di dunia setelah Kolombia dan Peru. Peningkatan produksi koka terus berlanjut memasuki pertengahan tahun 1980 sampai dengan tahun 1997. Beberapa tahun belakangan ini produksi daun koka mencapai US\$ 500 juta pertahun atau sekitar 5 sampai 8 persen dari GDP, melebihi produksi pertanian lainnya.¹³ Pada tahun 1989 kebijakan Amerika Serikat terhadap anti narkotika menghasilkan perang terhadap narkotik dan obat-obatan terlarang yang dikenal dengan *War on Drugs* di Bolivia.¹⁴

Kebijakan yang dikeluarkan melalui pemerintah Amerika Serikat ditujukan untuk menghilangkan peredaran kokain yang di keluarkan melalui pemerintah Amerika Serikat ditujukan untuk menghilangkan peredaran kokain yang berasal dari daun koka, selain itu produksi daun koka juga telah menyebabkan berbagai permasalahan di Bolivia dari mulai peredaran obat bius ilegal (kokain), kejahatan dan kekerasan, sampai pada perusakan lingkungan sekitar. Kebijakan Amerika Serikat juga ditujukan dalam rangka menguatkan iklim perekonomian kedua negara tersebut, Selain itu Hugo Banzer yang berkuasa pada saat itu mengeluarkan kebijakan pengembangan alternatif bagi tanaman dan pembasmian koka (anti-drugs), yang dikenal dengan *coca zero*. Pembasmian ladang koka ini kembali dikuatkan dengan adanya undang undang law anti-drug 1008.

Pembasmian ladang koka ini terus berlanjut hingga pemerintahan Carlos Mesa dibantu di bawah pengawasan Amerika Serikat. Perluasan pemberantas ladang koka ini semakin merajalela sejak bulan April 1988 pemerintahan Hugo Banzer mencanangkan “dignity plan” dibantu dengan pengawasan dari Amerika Serikat. Peter Nichols menyebutkan bahwa :

(Produksi koka merupakan bagian integral kehidupan Andean. Di Bolivia, ladang koka dapat dibilang sebagai tradisi. Buruh tambang dan orang-orang di dataran tinggi, dengan mengunyah koka dapat mencegah lapar dan menjaga daya tahan tubuh. Kemudian, terus menerus melakukan tekanan kepada pemerintah Siles (1982-1985) Bolivia menandatangani kelanjutan kerjasama yang disebut dengan rencana pembasmian koka 5 tahun dan membentuk kekuatan polisi khusus *anti-drug*, the Unidad Movil Policial para Areas Rurales (UMOPAR). Amerika Serikat tengah menyiapkan bantuan senilai 14,2 juta dollar AS. Dalam beberapa tahun terakhir,

¹² R. Crandall, *Driven by Drugs: U.S. Policy Toward Colombia*, (London: Lynne Rienmer Pub.,2002)

¹³ Benjamin Kohl dan Linda Farthing, *Impasse in Bolivia: Neoliberal Hegemony and Popular Resistance*, (London: Zed Books, 2006), hlm.74

¹⁴ Bolivia merupakan bagian dari program *war on drugs*, selain itu peru dan kolombia merupakan dua negara yang menjadi penghasil daun koka dan kokain yang disebut sebagai ancaman serius pertumbuhan produksi obat-obatan terlarang, ketiga negara ini menjadi fokus strategi Amerika Serikat untuk memerangi obat-obatan terlarang

terutama dibawah Banzer, giat menekankan program 'zero-coca', dengan menurunkan harga koka).¹⁵

Proses militerisasi di wilayah Chapare dilakukan oleh ratusan opsir polisi dan militer dengan melakukan paksaan menyerang tanah-tanah di Chapare yang dipertahankan oleh petani koka, sehingga mereka melakukan sejumlah penyiksaan dan pembunuhan yang tidak terkira jumlahnya yang sangat bertentangan dengan hak asasi manusia dan hak kebebasan. Sebagai seorang anggota Parlemen, Morales mengumumkan telah terjadi "militerisasi" konflik dan "pembunuhan besar-besaran" di Chapare. Disamping itu, Morales juga menyerukan untuk membela hak-hak kaum petani dan menentang "secara militer" oleh tentara yang melakukan pemberantasan ladang koka dan menembak para pemprotes. Tindakan kekerasan militer yang dilakukan tentara Bolivia mendapat peringatan keras dari penguasa tertinggi

Pengaruh negatif kerjasama pemberantasan kokain terhadap keamanan di Bolivia

Bolivia merupakan bagian dari program War on Drugs dari pemerintah Amerika Serikat, sehingga Bolivia menjadi fokus strategi internasional Amerika Serikat untuk memerangi peredaran obat-obatan terlarang. Kebijakan yang di terapkan pemerintah Bolivia melalui berbagai kerjasama dengan pihak Amerika Serikat seperti Blast furnace dan Coca zero ternyata lebih banyak memberi dampak negatif bagi penduduk Bolivia. Kebijakan yang di keluarkan melalui pemerintah Amerika Serikat untuk menghilangkan peredaran kokain yang berasal dari koka juga di tujuakan dalam rangka memperkuat dan menciptakan iklim perekonomian yang sehat bagi kedua negara. Pada saat Presiden Hugo Banzer yang kembali menjadi presiden Bolivia melalui pemilu tahun 1997 yang mengganti posisi dari Goni mengeluarkan kebijakan pengembangan alternatif bagi tanaman dan pembasmian koka (*anti-drugs*), yang dikenal dengan *coca zero*. Pembasmian ladang koka kembali di kuatkan dengan adanya undang undang *law anti-drug* 1008.

Bolivia sebagai salah satu penghasil dan produksi terbesar daun koka mendapat imbas dari kebijakan seiring dengan kebijakan pemerintah Amerika Serikat dan kebijakan ekonomi baru yang diterapkan pemerintah Bolivia. Berbagai aksi penangkapan, pembunuhan dan penghancuran ladang koka menjadi agenda pemerintah AS beserta para anggotanya dan bekerjasama atas persetujuan pemerintah Bolivia. Penangkapan para petani koka mendatangkan permasalahan baru, selain itu juga terjadi kejahatan kemanusiaan dengan beragam aksi penangkapan para petani koka dan pembasmian ladang koka di Bolivia. Akibatnya terjadi berbagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) telah terjadi di Bolivia, penangkapan disertai pembunuhan para petani koka menjadi permasalahan yang sangat serius.

Masa kepemimpinan Evo Morales, kebijakan pemberantasan kokain tetap di lakukan oleh pihak Amerika Serikat melalui DEA. Pada dasarnya, Evo Morales menolak adanya campur tangan pihak asing dalam urusan mengenai perkembangan koka di negaranya, meskipun begitu Morales tidak bisa sepenuhnya menolak kehadiran Amerika Serikat. Morales sadar akan keadaan bolivia saat itu yang masih sangat membutuhkan bantuan investasi asing guna membantu Bolivia keluar dari krisis. Hal tersebut bertujuan untuk membantu para petani dari tekanan pihak militer Amerika Serikat, Morales melakukan beberapa langkah konket. Pada juni 2006, Evo Morales meluncurkan kebijakan *Land Reform* dengan menyerahkan sperlima lahan negara kepada petani petani miskin di Bolivia. program Land Reform ini dilakukan di kota Santa

¹⁵ Peter Nicholls, "Bolivia: between a rock and a hard place", *Capital & Class: Autumm* 2003; 81; Academic Research Library, hlm. 13-14.

Cruz. Kota Santa Cruz dipilih karena kota ini merupakan pusat kekuasaan para pengusaha lahan dan wilayah pertanian di Bolivia. lahan seluas 3,1 hektar diserahkan kepada sekitar 60 kelompok masyarakat indian di wilayah timur Bolivia.

Pada 6 agustus 2006 di Sucre, Morales membuka sidang Umum parlemen. Tujuan sidang ini adalah menyusun kembali undang-undang (konstitusi) di negara tersebut. Konstitusi ini berisikan cara cara mengatasi kesenjangan sosial untuk menghilangkan dominasi dan peran kaum minoritas keturunan Eropa serta memberikan akses dan kesempatan yang lebih besar kepada masyarakat pribumi asli yang mayoritas miskin. Faktor kesenjangan ekonomi inilah yang selama ini menyebabkan terjadinya instabilitas sosial politik di Bolivia.

Kebijakan melegalkan koka yang di canangkan oleh Morales merupakan tindakan yang kontradiktif dengan kebijakan Amerika Serikat untuk memberantas peredaran narkoba dan juga menggalakkan perang terhadap kokain di Bolivia. Adanya kekuatan finansial yang besar dan merasa mendapat dukungan internasional bertekat untuk menghapuskan koka dari tanah Bolivia. Penghancuran ladang koka menyebabkan Bolivia mengalami kemiskinan khususnya para petani koka. Perang anti narkoba yang dilancarkan oleh Amerika Serikat menyebabkan ladang dan tanaman koka di Bolivia turun dari 70ribu hektar menjadi 30ribu hektar¹⁶. Ironisnya sesudah ladang dimusnahkan, para petani koka tidak memperoleh pilihan hidup yang layak, dan hal tersebut menyebabkan kemiskinan berkepanjangan yang melanda Bolivia.

Keterlibatan pihak militer Amerika Serikat terhadap upayanya untuk melakukan perang terhadap kokain di Bolivia secara tidak langsung memberikan pengaruh buruk terhadap ketahanan keamanan di Bolivia. Pemerintah Amerika Serikat telah mengutus DEA (*Drug Enforcement Administration*) sebagai agen yang melaksanakan upaya pemberantasan kokain di Bolivia. Bagi kalangan masyarakat Bolivia, keterlibatan DEA di nilai telah banyak melanggar ketentuan sehingga menimbulkan banyak pelanggaran sosial dan HAM.

Pada dasarnya misi dari DEA adalah bertujuan untuk mengurangi peredaran kokain dan obat-obatan terlarangan lainnya, Dalam usahanya tersebut DEA memberikan pelatihan khusus terhadap para polisi lokal atau polisi yang negaranya telah melakukan kerjasama dengan Amerika Serikat. Masa pendidikan sepuluh minggu memungkinkan petugas polisi mendapatkan pelatihan yang setara dengan pendidikan bagi agen khusus DEA. Mereka juga diperkenalkan pada konsep manajemen yang membuat mereka mampu mengembangkan dan mengarahkan unit penyelidikan narkoba, serta menyelenggarakan program pencegahan perdagangan narkoba pada masyarakat di wilayah masing-masing. Demi mengapresiasi hasil kerja dari DEA, Bolivia membentuk sebuah agen baru yang berisikan para militer dan polisi lokal yang di sebut UMOPAR. UMOPAR sendiri merupakan gabungan dari para militer dan polisi lokal Bolivia yang sebelumnya telah mendapatkan pendidikan dari DEA mengenai cara penanggulangan perdagangan kokain ilegal di Bolivia.

Pada tanggal 19 juli 1988, kongres Bolivia di tengah tekanan Amerika Serikat mengesahkan UU mengenai koka dan juga zat terlarang lainnya, atau lebih dikenal dengan sebutan UU 1008, Dengan adanya UU tersebut terbentuklah rezim yang mengatur dan bertanggung jawab atas berbagai bentuk regulasi Koka.¹⁷ Bolivia juga merupakan negara yang

¹⁶ Tajuk rencana. “ sensasi pemilihan presiden Bolivia”, <http://www.kompas.com> rabu 21 desember 2005. Diakses pada 7 januari 2013.

¹⁷ Meskipun serikat petani koka tidak mampu untuk mengamankan undang-undang tersendiri yang mengatur budidaya koka, pengaruh mereka dapat dideteksi pada kenyataan bahwa UU 1.008 dengan jelas membedakan antara

menandatangani perjanjian ekstradisi mengenai kejahatan narkoba dengan Amerika Serikat, sehingga Amerika Serikat berhak untuk mencampuri segala urusan yang berkaitan dengan pengadaan obat-obatan terlarang di Bolivia.¹⁸ Kedua aspek tersebutlah yang menjadikan DEA merasa memiliki wewenang untuk melakukan aksi pemberantasan kokain di Bolivia.

DEA adalah badan utama Amerika Serikat dalam melawan perdagangan narkoba di Bolivia. Saat ini ada sekitar 84 karyawan DEA di Bolivia, 20 di antaranya adalah aparat penegak hukum, di tempatkan di La Paz, Cochabamba, Chaphere, Santa Cruz dan Trinidad.¹⁹ Peran DEA sendiri telah jauh meluar melebihi wewenang yang telah di sepakati. Menurut laporan dokumen Departemen Luar Negeri Internal Bolivia, DEA telah memiliki peran yang dominan dalam mengarahkan dan merencanakan semua penegakan pembrantasan obat-obatan terlarang dan operasi pengumpulan intelijen di seluruh Bolivia.²⁰ Hal tersebut menunjukkan bahwa DEA telah mencampuri urusan militer internal Bolivia sehingga dapat menjadi ancaman bagi sistem keamanan di Bolivia. Artinya berdasarkan faktanya di lapangan DEA sendiri telah menjadi agen yang berfungsi sebagai aparat penegak hukum senior di Bolivia.

Amerika Serikat juga membentuk UMOPAR dengan persetujuan pemerintah Bolivia yang berada di bawah pengawasan pasukan khusus Amerika Serikat (DEA). Anggota UMOPAR menerima pelatihan khusus seperti bertahan hidup di hutan, operasi militer dan taktik taktik penyergapan. UMOPAR sendiri bisa dikatakan sebagai kekuatan paramiliter yang memakai seragam militer dan juga dibekali dengan senjata otomatis dan teroganisir dengan gaya militer. Pada saat itu para petinggi Bolivia curiga karena agen DEA telah memberikan pengaruh buruk sehingga dala melaksanakan tugasnya anggota UMOPAR seringkali salah sasaran, seperti membunuh para petani koka, dan juga melakukan penangkapan kepada para penduduk sipil.

Usaha pemberantasan kokain yang dinilai jalan di tempat dan tidak menghasilkan perubahan yang signifikan, maka pada tanggal 30 juli 1995 Amerika Serikat mengultimatum Bolivia untuk melakukan tiga langkah yaitu :

- Memperketat perjanjian ekstradisi yang dulu pernah di tandatangi
- Mengembangkan rencana yang komprehensif dan saling bekerjasama dalam memberantasa kultivasi gelap koka, meliputi jangka pendek, menengah dan panjang.
- Membasmi 1750 hektar ladang koka di Chapare.²¹

Ultimatum tersebut menimbulkan badai Politik di Bolivia. Akibatnya batas kedaulatan Bolivia Seolah tidak nampak lagi, Karena tuntutan Amerika serikat tersebut tidak terpenuhi, banyak para petani menjadi korban pembunuhan brutal militer Amerika Serikat. Ironisnya, UMOPAR yang notabene merupakan polisi lokal Bolivia yang seharusnya menjaga kedaulatan negara, ternyata juga terlibat dalam aksi keji tersebut. Akibat tuntutan Amerika Serikat tersebut, pemerintah Bolivia akhirnya mengumumkan bahwa mereka akan memulai untuk membasmi 1750 hektar

"koka dan bahan-bahan terlarang." Pasal 3 undang-undang tersebut, lebih khusus lagi, menarik sebuah "perbedaan esensial" antara coca pada keadaan aslinya, dan coca yang diproses secara kimia untuk mendapatkan alkaloid kokain. Bukti lebih lanjut dari perbedaan konseptual dapat ditemukan dalam Bab Salah satu hukum, yang mengacu pada sejarah pra-Kolombia koka dan tradisi panjang konsumsi halal di Bolivia.

¹⁸ U.N. Doc. E / CONF. 82/15 (1988

¹⁹ Antara tahun 1989 dan 1995, AS telah menghabiskan \$ 41 juta dolar untuk mendukung kegiatan DEA di Bolivia.

²⁰ Kutipan ini diambil dari sebuah memorandum Departemen Luar Negeri pengarah internal, tanggal 9 Agustus 1994, disiapkan untuk Ambassador Kamman, pada file di Human Rights Watch.

²¹ Teks komunikasi pada file di Human Rights Watch

ladang koka dan 5400 pada tahun berikutnya. Beberapa minggu setelah pengumuman tersebut, muncul berbagai demonstrasi. Menanggapi demonstrasi yang semakin memuncak tersebut, pemerintah menetapkan “jam malam”, melarang adanya pertemuan publik dan juga menangkap para pekerja dan pemimpin desa, dan tak jarang terjadi peristiwa penembakan di tempat oleh para militer Amerika Serikat. Pada minggu pertama keadaan darurat sekitar 400 orang yang terdiri, para pemimpin buruh, mahasiswa yang membela hak petani koka dan wartawan di tahan di barak militer yang fasilitasnya sangat tidak layak.

Krisis militer yang terjadi Bolivia juga mengakibatkan melemahnya sistem pertahanan di wilayah perbatasan. Brazil sebagai negara yang juga merasa terancam dengan perdagangan kokain Bolivia, ternyata juga menuntut Bolivia agar dapat menyelesaikan masalah perdagangan kokain. Akibat dari krisis militer dan politik yang sedang melanda Bolivia, menjadikan tuntutan Brazil tersebut terabaikan. Hal tersebut menjadikan Brazil agresif terhadap Bolivia, khususnya di wilayah perbatasan. Akibatnya banyak terjadi penembakan warga sipil Bolivia di perbatasan Brazil dengan Bolivia yang dilakukan oleh militer Brazil.

Simpulan

Pengaruh kerjasama Amerika Serikat dengan Bolivia dalam pemberantasan kokain terhadap Bolivia pada masa pemerintahan Evo Morales ternyata berpengaruh negatif terhadap keamanan di Bolivia. Kesimpulan tersebut mengacu pada banyaknya terjadi berbagai pelanggaran kemanusiaan dan HAM yang melibatkan militer lokal Bolivia dan militer asing (amerika serikat). Keterlibatan pihak militer dalam upaya kedua negara tersebut untuk memberantas kokain, menimbulkan ketidak seimbangan fungsi dari para militer tersebut. Khususnya bagi militer lokal Bolivia yang seharusnya menjaga kedaulatan nasionalnya, tapi dalam kenyataannya militer lokal Bolivia juga terlibat dalam tindakan pemerasan, pembunuhan, pelanggaran HAM dan juga kejahatan kemanusiaan lainnya. Berbagai pelanggaran kemanusiaan tersebut dikarenakan adanya intervensi dari pihak asing yaitu Amerika Serikat.

Kerjasama pemberantasan dalam pemberantasan kokain antara Bolivia dan Amerika Serikat ternyata berpengaruh negatif terhadap keamanan di Bolivia. Ada indikasi bahwa melalui kerjasama tersebut, Amerika Serikat berupaya untuk mendominasi Bolivia, karena Amerika Serikat menganggap bahwa Bolivia merupakan lahan yang menjanjikan untuk menanamkan investasi dan paham demokrasi. kerjasama tersebut ternyata juga telah menimbulkan berbagai masalah keamanan seperti pembunuhan, perampasan, pencurian dan berbagai pelanggaran HAM lainnya terhadap para petani koka yang dilakukan oleh pihak militer sebagai alat yang memiliki wewenang untuk menjalankan tugasnya dalam memberantas kokain di Bolivia.

Intervensi pemerintah Amerika Serikat terhadap pemerintah Bolivia juga sangat terasa pada masa pemerintahan Evo Morales, karena Amerika Serikat sendiri saat itu yakin bahwa ketika Morales menjabat menjadi presiden, maka posisinya di Bolivia pasti terancam. Mengatasi masalah tersebut, Amerika Serikat menggunakan UU 1008 mengenai kontrol dan penanganan obat-obatan terlarang yang telah disepakati kedua negara sebelumnya untuk mempertahankan dominasinya di Bolivia. Hal tersebut ditunjukkan dengan ditambahnya agen DEA (*Drug Enforcement Administration*) sebagai alat bagi Amerika Serikat untuk menjalankan misinya di Bolivia. Saat menjalankan tugasnya untuk memberantas peredaran kokain, ternyata DEA juga memberi pengaruh buruk kepada UMOPAR sebagai polisi pemberantasan obat-obatan terlarang lokal Bolivia. Akibat pengaruh buruk tersebut, pasukan UMOPAR kerap melakukan tindakan kekerasan seperti penyiksaan, pembunuhan dan pemerasan terhadap para petani koka dalam

melakukan tugasnya. Morales sadar bahwa keadaan tersebut merupakan krisis keamanan bagi Bolivia. Akibat krisis tersebut, kedaulatan Bolivia juga ikut terancam. Melemahnya peran militer Bolivia menjadikan Bolivia mudah mendapat intervensi Militer dari negara-negara tetangga seperti Brazil yang merasa terancam dengan peredaran kokain di Bolivia.

Daftar pustaka

Buku:

- Belen, Boville. 2004. *the cocaine war in context: drugs and politics*. new york: Alogan Publishing
- Bertram, E. C. 1996. *Drug War Politics: The Price of Denial*. Berkeley: Universitas of California press
- Kohl, Benjamin dan Linda Farthing. 2006 *Impasse in Bolivia: Neoliberal Hegemony and Popular Resistance*. London: Zed Books
- Mesa, José, Gisbert, Teresa, Mesa Gisbert, Carlos D. 1998. *Historia de Bolivia: Segunda Edición corregida y actualizada*. La Paz: Editorial Gisbert.
- Molineu, Harold. 1990. *U.S Policy Toward Latin America; From Regionalism to Globalism*". San Francisco: Westview Press
- Nichols, Peter. 2003. *Bolivia: Between A Rock Place and Hard Place*. Autumn: *Capital & Class*

Jurnal dan Paper:

- Richard B. Craig, "Colombian Narcotics and United States-Colombian Relation" dalam *Journal Of Interamerican Studies And World Affairs*, Vol 23, No 3
- Rum Muhammad, " Bolivia : Tradisi Revolusi dan Indigenismo Evo Morales", Selasa 25 Desember 2007

Internet :

- Country Profile: Bolivia", Library Of Congress – Federal Research Divisions, Diakses Dari [Http://Lcweb2.Loc.Gov/Frd/Cs/Profiles/Bolivia.Pdf](http://lcweb2.loc.gov/frd/cs/profiles/Bolivia.pdf) Pada Tanggal 1 Nov 2012
- evo morales terapkan kebijakan anti kemiskinan, legalkan koka (bolivia, 20 juli 2006. di akses dari <http://www.kompas.com> tanggal 26 nov 2012.
- Kevin healy, "bolivian ang cocain : a developing coutry dilemmas" <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1360-0443.1988.tb00445.x/pdf>
- Maria Amparo Lasso," South America: the Business of the legal coca" dikutip dalam <http://ipsnews.net>. diakses 27 nov 2012.

Natalis Spinger, “ Bolivia A Situation Analysis”, A Writenet Report Commissioned By United Nations High Commisioner For Refugees, Diakses Dari [Www.ilw.Com/Articles/2005,0629-Bolivia.Pdf](http://www.ilw.com/articles/2005,0629-Bolivia.pdf) Pada Tanggal 9 Nov 2012

Tajuk rencana. “ sensasi pemilihan presiden Bolivia”, <http://www.kompas.com> rabu 21 desember 2005. Diakses pada 7 januari 2013.